

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengetian Pemahaman

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pemahaman yaitu proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Berarti dapat dikatakan bahwa orang yang mempunyai pemahaman akan standar akuntansi adalah orang yang pandai, paham dan mengerti benar tentang standar akuntansi. Hal ini diperjelas oleh (Sudijono, 1996) bahwa pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu tersebut diketahui dan diingatkan.

Menurut Nuraini (2007) dalam kurniawan (2013) menyatakan pemahaman akuntansi merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mengenal dan mengerti tentang akuntansi, maka pemahaman IFRS merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mengukur, mengklasifikasi (membedakan) dan mengikhisarkan penyajian unsur-unsur laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam IFRS.

2.2 Pengertian IFRS dan Penggunaan IFRS secara Global

Menurut Warren, dkk (2014) *International Financial Reporting Standard* (IFRS) merupakan seperangkat standar akuntansi global yang dikembangkan oleh *International Accounting Standards Board* (IASB) untuk penyusunan laporan keuangan perusahaan. IASB merupakan badan independen yang membuat peraturan akuntansi. IASB tidak membuat peraturan akuntansi untuk suatu negara tertentu melainkan dengan membuat peraturan akuntansi yang dapat digunakan oleh berbagai negara dengan tujuan mengembangkan seperangkat standar akuntansi global. IFRS digunakan bagi perusahaan yang menerbitkan utang dagang dan surat berharga untuk ekuitas kepada public yang disebut perusahaan publik.

Tujuan dilakukannya konvergensi IFRS yaitu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan serta dapat meningkatkan arus investasi global melalui perbandingan laporan keuangan antar satu negara dengan negara lain. Menurut Warren, dkk (2014) Sejak tahun 2005, seluruh 27

negara di Eropa (UE) telah diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan IFRS. Selain itu, lebih dari 100 negara lainnya telah mengadopsi IFRS bagi perusahaan publiknya. Di Negara dengan ekonomi maju, Jepang sedang mempertimbangkan adopsi wajib pada tahun 2016, India memungkinkan penggunaan terbatas atas IFRS, dan China sedang mengonvergensi standarnya dengan IFRS dari waktu ke waktu. Di Australia, entitas pemerintah lokal menunjukkan peningkatan signifikan pada liabilitas setelah penerapan IFRS (Ahmed dan Alam, 2012) dalam (Kristanti, 2013). Hal yang sama terjadi di New Zealand, rata-rata total aset, total liabilitas dan laba bersih lebih tinggi setelah dilakukan adopsi (Kabir et al, 2010) dalam (Kristanti, 2013).

2.3 IFRS di Indonesia

Menurut Warren, dkk (2014) Indonesia secara resmi mengadopsi IFRS untuk perusahaan Indonesia sejak 2008 dan secara efektif diterapkan pada tahun 2012. Penerimaan luas yang diperoleh IFRS di seluruh dunia, bagaimanapun juga telah menempatkan tekanan besar pada Indonesia untuk menyelaraskan SAK dengan IFRS. Indonesia perlu mencapai konvergensi SAK dan IFRS.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan badan pemerintah Indonesia yang memiliki kewenangan atas akuntansi dan pengungkapan keuangan untuk perusahaan publik Indonesia. OJK telah memperkenalkan peraturan dalam menyajikan laporan keuangan yang biasa disebut sebagai peraturan VIII.G.7. Dalam peraturan tersebut, OJK mewajibkan perusahaan public untuk menerapkan SAK yang diterbitkan oleh DSAK. OJK dan DSAK memiliki kesepakatan bersama bahwa perusahaan publik Indonesia harus menerapkan SAK dan SAK akan dikonvergensi ke IFRS. Salah satu keterbatasan utama dalam konvergensi adalah DSAK dan IASB terus beroperasi sebagai lembaga yang menetapkan standar akuntansi untuk yuridiksi masing-masing. Dengan demikian, konvergensi tidak akan menghasilkan satu set standar akuntansi global. Hanya standar yang melalui proses penetapan standar gabungan DSAK-IASB yang akan dirilis. Standar yang tidak melalui proses penetapan standar gabungan dapat

menciptakan ketidakkonsistenan antara SAK dan IFRS. Dengan demikian, konvergensi tidak menjamin keseragaman lengkap antara SAK dan IFRS.

Sebuah ringkasan singkat dari keputusan Indonesia yang utama yang berhubungan dengan IFRS diuraikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Perjalanan menuju IFRS

Tahun	Proses
2008-2011	<ul style="list-style-type: none"> • DSAK memutuskan untuk mengadopsi IFRS ke dalam SAK • Mempersiapkan semua infrastruktur yang diperlukan seperti pendidikan dan pelatihan, peraturan, dan teknologi • Mengantisipasi konsekuensi adopsi dari IFRS
2011	<ul style="list-style-type: none"> • Menyelesaikan proses adopsi dan untuk menyelesaikan menyiapkan semua infrastruktur yang dibutuhkan
2012	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi pertama dari SAK yang telah mengadopsi IFRS oleh perusahaan publik • Mengevaluasi semua konsekuensi ekonomi dari adopsi IFRS
2013-2015	<ul style="list-style-type: none"> • Meminimalkan perbedaan antara SAK dan IFRS secara bertahap • Mendidik dan melatih perusahaan public yang terdaftar dalam pengelola dan mengantisipasi setiap revisi SAK

Sumber : Warren, dkk (2014)

Tabel 2.2
Daftar nama negara yang telah mengadopsi IFRS

No	Nama Negara	No	Nama Negara	No	Nama Negara
1	Abu Dhabi- Uni Emirat arab	24	Israel	47	Norwegia
2	Afrika Selatan	25	Italia	48	Panama
3	Argentina	26	Jamaika	49	Peru
4	Australia	27	Jerman	50	Polandia
5	Austria	28	Kanada	51	Portugal
6	Belanda	29	Kenya	52	Prancis
7	Belgia	30	Korea selatan	53	Qatar
8	Bosnia	31	Kosta rika	54	Republik Cheska
9	Brasil	32	Kroasia	55	Republik Slovakia
10	Bulgaria	33	Kuwait	56	Rumania
11	Cile	34	Latvia	57	Rusia
12	Denmark	35	Lebanon	58	Selandia Baru
13	Dubai-Uni Emirat Arab	36	Libia	59	Serbia
14	Ekuador	37	Liechtenstein	60	Slovenia

15	Estonia	38	Lithuania	61	Spanyol
16	Finlandia	39	Luksemburg	62	Swedia
17	Guatemala	40	Meksiko	63	Turki
18	Hong kong	41	Mesir	64	Yordania
19	Hungaria	42	Mongolia	65	Yunani
20	Indonesia	43	Belanda	66	Zambai
21	Irak	44	Selandia baru		
22	Inggris	45	Nikaragua		
23	Irlandia	46	Nigeria		

Sumber : Warren, dkk (2014)

2.4 Empat Standar Akuntansi yang Berlaku Di Indonesia

Menurut Martani (2012 : 16) Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia terdiri empat standar (empat pilar standar akuntansi) yaitu :

1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) digunakan untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik yaitu entitas atau dalam proses pendaftaran di pasar modal atau entitas fidusia (yang menggunakan dana masyarakat seperti asuransi, perbankan, dan dana pensiun).
2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)
Standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP) digunakan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dalam menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*).
3. Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah)
Standar Akuntansi keuangan Syariah (SAK Syariah) adalah standar yang digunakan untuk entitas yang memiliki transaksi syariah atau entitas berbasis syariah.
4. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
Standar akuntansi pemerintah (SAP) adalah standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Menurut Martani, dkk (2012:16) IFRS sebagai standar internasional memiliki tiga ciri utama sebagai berikut :

1. Principles-Based

Standar yang menggunakan *Principles-Based* hanya mengatur hal-hal yang pokok dalam standar sedangkan prosedur dan kebijakan detail diserahkan kepada pemakai. Standar mengatur prinsip pengakuan sesuai substansi ekonomi, tidak didasarkan pada ketentuan detail dalam atribut kontrak perjanjian. Sedangkan

standar yang rule based, memuat ketentuan pengakuan akuntansi secara detail. Keunggulan pendekatan ini akan menghindari dibuatnya perjanjian atau transaksi mengikuti peraturan dalam konsep pengakuan. Penyusunan laporan keuangan dapat merancang suatu transaksi sehingga dapat diakui secara akuntansi dan bukan melihat dari substansi ekonomi dari transaksi tersebut. Namun, standar yang bersifat *Principles-Based* mengharuskan pemakainya untuk membuat penilaian (adjustment) yang tepat atas suatu transaksi untuk menentukan substansi ekonominya dan menentukan standar yang tepat untuk transaksi tersebut.

2. Nilai wajar

Standar akuntansi banyak menggunakan konsep nilai wajar (*fair value*). Penggunaan nilai wajar untuk meningkatkan relevansi informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan. Informasi nilai wajar lebih relevan karena menunjukkan nilai terkini. Hal ini sangat bertolak belakang dengan konsep harga perolehan yang mendasarkan penilaian pada nilai perolehan pertama (*historical cost*). Banyak pengakuan akuntansi saat ini yang dasar penilaiannya masih menggunakan *historical cost*. IFRS membuka peluang penggunaan nilai wajar yang lebih luas untuk beberapa item, seperti aset tetap dan aset tak berwujud, dibuka opsi penggunaan nilai wajar selain nilai perolehan. Nilai wajar lebih relevan namun harga perolehannya diyakini lebih reliable.

3. Pengungkapan

Mengharuskan lebih banyak pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengungkapan diperlukan agar pengguna laporan keuangan dapat mempertimbangkan informasi yang relevan dan perlu diketahui terkait dengan apa yang dicantumkan dalam laporan keuangan dan kejadian penting yang terkait dengan item tersebut. Pengungkapan dapat berupa kebijakan akuntansi, rincian detail, penjelasan penting, dan komitmen.

2.5 Masalah dan Tantangan yang Dihadapi Indonesia dalam Konvergensi IFRS

Setiap negara menghadapi masalah dalam melaksanakan konvergensi standar akuntansi nasionalnya dengan IFRS. Tetapi jenis dan bobot masalah dan tantangan yang dihadapi masing-masing Negara berbeda-beda. Masalah yang dihadapi Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Australia, Jepang, dan Indonesia berbeda.

Menurut Kartikahadi, dkk (2012:27) permasalahan yang dihadapi Indonesia antara lain sebagai berikut :

1. Ketidakstabilan nilai rupiah

Sehubungan dengan nilai rupiah yang cenderung lemah di pasar valuta asing, dan sering kali tidak stabil, maka perubahan IAS 21 *the effects of changes in foreign exchange rates* mendekati FABS akan mempunyai dampak serius dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan yang sarat *exposure* valuta asing, terutama bila terjadi devaluasi atau depresiasi rupiah secara serius, seperti kejadian di tahun 1978, 1983, 1986, 1997

2. Landasan hukum yang berbeda
Aspek hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di suatu Negara sering kali merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam mengadopsi suatu standar akuntansi. Misalnya dalam PSAK 1 penyajian laporan keuangan, dalam definisi SAK termasuk peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada dibawah pengawasannya.
3. Profesi penunjang lain yang belum berkembang setaraf internasional
Pengapliasian beberapa standar akuntansi memerlukan dukungan dari profesi penunjang lain (penilai, aktuaris, dll) yang setaraf dengan Negara maju.
4. Frekuensi perubahan IFRS
IASB relatif sering melakukan revisi atas standar yang dikeluarkannya. Setiap standar akuntansi perlu dipahami secara jelas sebelum diterapkan.

Standar IFRS harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan seringkali terdapat kendala dikarenakan sulitnya menemukan terjemahan yang sesuai, konsistensi penggunaan terjemahan, penggunaan suatu istilah untuk penerapan konsep yang berbeda. Selain itu kesiapan perguruan tinggi dan akuntan pendidik untuk berganti kiblat ke IFRS juga menjadi suatu hambatan. Perguruan tinggi merupakan salah satu tempat yang dapat digunakan untuk mensosialisasikan IFRS. Oleh karena itu, perguruan tinggi mempunyai peran dalam proses konvergensi IFRS.

2.6 Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK 1) tentang Penyajian Laporan Keuangan (setelah terjadinya konvergensi)

2.6.1 Tujuan laporan keuangan

Menurut Ikatan akuntan Indonesia (IAI) (2013) laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya dipercayakan kepada mereka.

2.6.2 Ruang Lingkup PSAK 1

Menurut Kartikahadi, dkk (2012: 117) menyatakan bahwa PSAK 1 berlaku untuk semua entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan standar akuntansi keuangan, termasuk entitas yang

menyajikan laporan keuangan konsolidasi sebagaimana diatur dalam PSAK 4 laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri.

PSAK ini tidak wajib bagi entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP). Untuk ETAP, DSAK-IAI telah menerbitkan secara khusus SAK-ETAP yang menjadi dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan ETAP. Namun, jika suatu ETAP memilih untuk menetapkan pengaturan dalam PSAK, maka ETAP tersebut harus menetapkan PSAK secara keseluruhan, termasuk menetapkan PSAK 1 sebagai dasar untuk penyajian dan penyusunan laporan keuangannya.

PSAK ini tidak berlaku bagi entitas syariah. Untuk entitas syariah, DSAK-IAI telah menerbitkan SAK syariah, termasuk PSAK 101 penyajian laporan keuangan syariah.

2.6.3 Komponen Laporan Keuangan

Menurut Greuning,dkk (2013:23) satu set laporan keuangan yang lengkap terdiri atas :

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode
2. Laporan laba rugi komprehensif selama periode
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode
4. Laporan arus kas selama periode
5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain.
6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

Penjelasan dari komponen laporan keuangan diatas :

1. Laporan Posisi Keuangan/Neraca (*Statement Of Financial Position*)

adalah suatu daftar yang menunjukkan posisi keuangan, yaitu komposisi dan jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas dari suatu entitas tertentu pada suatu tanggal tertentu. PSAK 1 memperkenalkan adanya komponen keenam yang merupakan laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif dalam hal entitas melakukan penerapan retrospektif atau mereklasifikasikan pos-pos laporan keuangan. Misalnya entitas menyajikan laporan keuangan untuk periode yang berakhir 31 desember 20X2 dan pada periode tersebut, entitas melakukan penerapan kebijakan akuntansi secara retrospektif, maka pada saat menyajikan laporan keuangan yang berakhir 31 Desember 20X2, entitas akan menyajikan

laporan posisi keuangan 31 Desember 20X2 dengan perbandingan 31 Desember 20X1 dan Januari 20X1.

2. Laporan laba rugi komprehensif (*statement of comprehensive income*)

PSAK 1 memperkenalkan laba rugi komprehensif yaitu laporan yang memberikan informasi mengenai kinerja entitas yang menimbulkan perubahan pada jumlah ekuitas entitas yang bukan berasal dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Laba rugi komprehensif terdiri atas :

- Laba rugi,
- Pendapatan komprehensif lainnya

Laba rugi

Laba rugi memberikan informasi mengenai pendapatan, beban, dan laba rugi suatu entitas selama suatu periode tertentu. Laporan ini memberikan informasi mengenai hasil bersih entitas, sama dengan jumlah laba bersih yang dilaporkan dalam laporan laba rugi yang selama ini dikenal.

Pendapatan komprehensif lainnya

Pendapatan komprehensif lain atau bisa disebut *other comprehensive income* berisi pos-pos pendapatan dan beban yang tidak diakui dalam rugi laba.

Komponen pendapatan komprehensif lainnya adalah :

- * Perubahan dalam surplus revaluasi aset tetap, karena entitas menggunakan metode revaluasi untuk satu atau lebih kelompok aset tetapnya, sebagaimana diatur dalam PSAK 16 aset tetap
- * Keuntungan dan kerugian aktuarial atas program manfaat pasti, sebagaimana diatur dalam PSAK 24 imbalan kerja.
- * Keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan, sebagaimana diatur PSAK 10 pengaruh perubahan nilai tukar valuta asing.

3. Laporan perubahan ekuitas (*Statement Of Changes In Equity*)

Untuk suatu entitas usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT), laba yang ditahan dan tidak atau belum dibagikan sebagai dividen disajikan dalam neraca sebagai bagian dari ekuitas, selain itu juga sering kali terjadi macam-

macam transaksi dan kejadian yang menyebabkan terjadinya perubahan saldo awal ekuitas sehingga sampai pada saldo akhir ekuitas.

4. Laporan arus kas (*Statement Of Cash Flow*)

Informasi tentang kas dan setara kas serta arus penerimaan dan penggunaan dana kas dan setara kas adalah informasi yang sangat penting dan berguna untuk dilaporkan dan dipahami oleh para pemangku kepentingan.

2.6.4 Perbedaan PSAK 1 Konvergensi IFRS dan PSAK 1 Sebelum Konvergensi IFRS

Berikut perbedaan PSAK 1 sebelum dan setelah konvergensi IFRS untuk item terpilih yang mendasar mengenai penyajian laporan keuangan :

Tabel 2.3
Perbedaan PSAK 1 Konvergensi IFRS dan PSAK 1 Sebelum Konvergensi IFRS

No	Perihal	PSAK 1 konvergensi IFRS	PSAK 1 sebelum konvergensi IFRS
1	Komponen laporan keuangan yang lengkap	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan posisi keuangan • Laporan laba rugi komprehensif • Laporan perubahan ekuitas • Laporan arus kas • Catatan atas laporan keuangan • Laporan posisi keuangan awal periode komparatif sajian akibat penerapan retrospektif, penyajian kembali, atau reklasifikasi pos-pos laporan keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Neraca • Laporan laba rugi • Laporan perubahan ekuitas • Laporan arus kas • Catatan atas laporan keuangan
2	Istilah	Aset, liabilitas, ekuitas, beban pokok penjualan	Aktiva, kewajiban, modal, harga pokok penjualan
3	Pos luar biasa	Penggunaan istilah “pos luar biasa” tidak diperkenankan	Penggunaan istilah “pos luar biasa” diperkenankan
4	Kepentingan non pengendali	<ul style="list-style-type: none"> • Istilah yang digunakan adalah “non-pengendali” • Dalam laporan posisi keuangan disajikan di 	<ul style="list-style-type: none"> • Istilah yang digunakan adalah “hak minoritas” • Dalam neraca,

		ekuitas <ul style="list-style-type: none"> • Dalam laporan laba rugi dan laporan laba rugi komprehensif, laba bersih dialokasikan antara pemilik ekuitas entitas induk dan hak non-pengendali 	disajikan secara terpisah antara kewajiban dan ekuitas <ul style="list-style-type: none"> • Dalam laporan laba rugi, hak minoritas atas laba atau rugi disajikan sebagai pengurang laba bersih
--	--	--	---

Sumber : <http://staff.uny.ac.id>

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi dalam penelitian ini adalah :

1. Frida Kartika Nurani (2011) melakukan penelitian mengenai persepsi mahasiswa akuntansi mengenai *International Financial Reporting Standards*. Penelitian penelitian ini bermaksud melihat dan menganalisa persepsi mahasiswa akuntansi strata satu yang belum dan telah menempuh mata kuliah akuntansi internasional di STIE Perbanas Surabaya. Hasil dari penelitian ini yaitu mayoritas mahasiswa baik yang belum menempuh dan yang telah menempuh mata kuliah akuntansi internasional ternyata mengetahui standar akuntansi yang dipergunakan atau dipakai di Indonesia PSAK, IFRS, ETAP, dan SAP walaupun ada beberapa mahasiswa yang menjawab SEBI, PAPI, API, PBI, dan GAAP, bahkan ada yang menjawab IAI, dimana IAI bukan merupakan standar akuntansi namun organisasi/badan yang menaungi akuntan di Indonesia. Di saat ditanya apa yang kalian ketahui tentang IFRS, mereka menjawab IFRS adalah standar akuntansi internasional yang dipergunakan sebagai pedoman untuk pembuatan laporan keuangan yang akan diterapkan di Indonesia pada tahun 2012 lewat proses konvergensi yang pengukurannya menggunakan nilai wajar.
2. Rosita Adi Kristanti dan Paskah Ika Nugroho (2013) melakukan penelitian mengenai Investigasi persepsi mahasiswa akuntansi terhadap *International Financial Reporting Standards*. Penelitian ini dilakukan dengan populasi penelitian yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana, pemilihan sampel digunakan metode

disproportionate stratified random sampling berdasarkan usia, tahun masuk, dan gender guna untuk perbedaan tingkat pengetahuan mahasiswa terhadap IFRS berdasarkan usia, tahun masuk dan hasilnya yaitu tidak terdapat perbedaan tingkat pengetahuan antara mahasiswa pria dan wanita serta terdapat perbedaan tingkat pengetahuan yang signifikan pada kelompok tahun masuk.

2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang teridentifikasi sebagai masalah riset, Sugiyono (2014:127). Mahasiswa merupakan status tinggi dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, mahasiswa harus mampu memahami ilmu pengetahuannya sesuai dengan kompetensi masing-masing, termasuk tentang pemahaman terhadap IFRS dan mahasiswa jurusan akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya merupakan objek penelitian ini.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran